

## Peranan Gereja dalam Mewujudkan Butir Ketujuh Sila Ke-Empat Pancasila

Johny J. Kilapong

*Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*johnykilapong@stak-kupang.ac.id*

### Abstrak

Gereja dan negara tidak dapat dipisahkan. Gereja ada di dalam negara dan memiliki tanggung jawab untuk memajukan negara. Negara dan Gereja memiliki hubungan satu dengan yang lain dalam tugas dan tanggung jawabnya membangun bangsa. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki kehidupan yang layak seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menganalisis peranan Gereja dalam mewujudkan butir ketujuh sila ke empat Pancasila. Melalui studi pustaka, peneliti mengumpulkan data dari pelbagai sumber guna mendapat informasi terkait fokus penelitian. Studi memperlihatkan bahwa Gereja bertanggung jawab untuk mempersiapkan jemaat memiliki kehidupan spiritual, moral dan mental yang bertanggung jawab sehingga menjadi warga gereja dan masyarakat yang dapat memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Pancasila ditetapkan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman hidup, dasar dan ideologi negara. Pancasila telah menjadi semboyan, filosofi dan budaya bangsa Indonesia. Setiap warga negara termasuk warga gereja bertanggung jawab untuk memahami, menghayati dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Gereja bertanggung jawab untuk mewujudkan sila keempat dalam kehidupan di dalam keluarga, pelayanan gereja, sekolah, pekerjaan dan masyarakat. Karena gereja bertanggung jawab untuk mensejahterakan kota di mana gereja berada (Yeremia 29:7).

**Kata kunci:** gereja, negara, sila ke empat, pancasila

### Abstract

*Church and state cannot be separated. The church is within the state and has the responsibility to advance the state. The state and church have a relationship with each other in their duties and responsibilities in building the nation. The state has the responsibility to provide services that can help people to have a decent life, such as health, education and welfare. Therefore, this article aims to analyze the role of the Church in realizing the seventh and fourth principle of Pancasila. Through literature study, researchers collect data from various sources to obtain information related to the research focus. Studies show that the Church is responsible for preparing the congregation to have a responsible spiritual, moral and mental life so that they become members of the church and society who can contribute to the progress of the nation. Pancasila was established by the founding fathers of the nation as a guide to life, the basis and ideology of the state. Pancasila has become the motto, philosophy and culture of the Indonesian nation. Every citizen, including church members, is responsible for understanding, appreciating and implementing the values of Pancasila. The church is responsible for realizing the fourth principle in life in the family, church ministry, school, work and society. Because the church is responsible for the prosperity of the city where the church is located (Jeremiah 29:7).*

**Keywords:** church, fourth precept, state, pancasila

## **Pendahuluan**

Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, demikian bunyi butir ketujuh dari sila keempat Pancasila. Tidak mudah mengamalkan butir ketujuh sila keempat ini di dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap manusia sulit untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Permasalahan faktual di masyarakat yang terus berulang terjadi dalam setiap pemilihan presiden adalah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, yang kalah sulit menerima kekalahan, terjadi *money politic* dalam setiap pemilihan, konflik antar pendukung calon presiden, calon gubernur atau calon walikota dan bupati di hampir semua kota di Indonesia (Detik News. Com, 2019). Tidak sedikit Gubernur, Walikota dan Bupati hidupnya memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Banyak pejabat yang akhir masa jabatannya harus mendekam di penjara karena semasa tugas melakukan korupsi (Kompas.com. 2022).

Masalah lainnya yang terjadi di masyarakat meningkatnya radikalisme, sikap tidak toleran antar umat beragama dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang hanya berpihak kepada kelompok atau agama tertentu (BBC, 2020). Kita juga menemukan perkelahian antar pelajar dan mahasiswa, konflik antar suku dan kelompok. Siswa tidak menerima kekalahan dalam suatu pertandingan yang berujung pada perkelahian bahkan pembunuhan sesama pelajar. Pemilihan ketua OSIS yang berujung ricuh dan pemilihan ketua senat yang berakhir dengan konflik antar pendukung calon ketua. Persoalan rasisme juga banyak terjadi di antara pelajar di Indonesia sampai saat ini (Oke Zone, 2021).

Hal inilah yang mendasari penulisan artikel ini yang berfokus kepada pembahasan Peranan Gereja dan Negara dalam mewujudkan sila ke empat Pancasila. Gereja dan negara merupakan topik hangat dalam diskursus teologi dan pendidikan Kristen. Gereja tidak dapat dipisahkan dengan negara karena gereja ada di dalam negara dan untuk berkontribusi bagi negara. Hal ini sangat terkait dengan tujuan kehadiran gereja yang tercatat di dalam Yoh. 17:18 dan Yeremia 29:7 yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja untuk menciptakan kesejahteraan dimanapun Tuhan menempatkan gereja. Gereja dan Negara memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena gereja berada di dalam wilayah negara dan dengan suatu pemerintahan sebagai wakil Allah untuk mengatur, menata, melindungi, memerintah dan mensejahterakan rakyat (Roma 13:1-7). Posisi dan fungsi gereja di dalam suatu negara sangat vital karena gereja bertindak sebagai perwakilan Allah dalam melaksanakan kehendak Allah di bumi.

Sebelum membahas lebih jauh terkait hubungan gereja dengan negara, ada beberapa pertanyaan yang dapat menjadi landasan pembahasan dalam tulisan ini. Apa esensi gereja, apakah tujuan kehadiran gereja, apa pandangan Kristen terkait negara? apa peran gereja bagi negara? Bagaimana Misi Gereja dalam menjalankan Pancasila khususnya sila ke-4? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan pikir gereja dan panduan gereja dapat menjalankan misinya di bumi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka menurut Kartono (1998) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mencatat berbagai literatur/bacaan yang terkait dengan pokok-pokok yang dibahas lalu disaring dan disusun berupa kerangka pemikiran secara teoritis. Dengan demikian, data dalam penelitian ini diperoleh melalui pelbagai pustaka berupa jurnal dan buku-buku yang terkait dengan fokus penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengertian Gereja dan Negara

Gereja dalam pembahasan tulisan ini tidak terkait dengan gereja dalam konteks bangunan atau Gedung pertemuan tetapi individu dan kelompok atau komunitas orang yang percaya kepada Kristus. Komunitas yang disebut gereja dalam tulisan ini memiliki kriteria sebagai pengikut Kristus yang telah mengalami kelahiran baru dan memutuskan sepenuhnya percaya dan mengikuti kehidupan Kristus (I Kor 12:27; Ef 1:23). Kata Gereja berasal dari kata *igreja* (bahasa portugis,) dan *ecclesia* bahasa latin dan dalam bahasa Yunani *ekklesia*. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita menemukan beberapa kata tentang gereja yang diterjemahkan jemaat atau sidang jemaat; jemaat yang tinggal di salah satu wilayah, persekutuan semua orang percaya dan disebut juga gereja yang tidak nampak secara fisik (Mat 16:18); jemaat di suatu kota (KPR 15) dan jemaat yang bersekutu di suatu rumah (Rom 16:5).

Kata “*ekklesia*” adalah istilah politik dalam sistem demokrasi Yunani kuno dari akar kata *kaleo* (Bahasa Yunani) yang merujuk kepada orang atau sekelompok orang yang dipanggil keluar yang disebut sebagai orang-orang yang dipilih dan bersatu untuk menjadi wakil rakyat. Gereja adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar berkumpul oleh Allah. Sebagai kelompok orang percaya, gereja mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk aliran. Kata negara dari kata “*staat*” (Bahasa Jerman) dan “*State*” (Bahasa Inggris) mengandung arti kelompok masyarakat atau wilayah teritorial politis dan memiliki pemerintahan yang terpusat yang bertanggung jawab menata menguasai wilayah tersebut. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara berarti sekelompok orang di suatu wilayah yang tertata diatur dalam sebuah pemerintahan dan rakyat yang diperintah. Pemerintah bertindak sebagai penguasa yang diakui oleh rakyat yang diperintah dan memerintah dalam kewenangan yang diberikan dan dipatuhi rakyat. Negara adalah organisasi tertinggi yang mempunyai otoritas dan wewenang yang dilindungi Undang-Undang untuk mengatur dan mengelola sesuatu yang terkait dengan kepentingan rakyat. Negara bertanggung jawab dalam melindungi setiap warganya, mencerdaskan dan mensejahterakan.

Negara adalah institusi kekuasaan yang memiliki kedaulatan yang diberikan rakyat untuk menata pemerintahan dengan aturan yang tertib berlaku di setiap wilayah pemerintahan, memiliki suatu sistem atau undang-undang yang berlaku untuk semua warga dan berdiri secara mandiri. Gereja adalah orang-orangnya, sebuah kongregasi, sebuah assembly dan sebuah komunitas atau persekutuan (Eka Darmaputera dan Marthin Luther). Gereja adalah sebuah komunitas atau persekutuan orang percaya di dalam Kristus. Komunitas atau persekutuan gereja ini berada disatukan di dalam Kristus, hidup untuk Kristus dan melayani Kristus di luar itu hanya sekedar perkumpulan atau persekutuan belaka.

### Relasi Gereja dan Negara

Kaitan antara Gereja dan Negara bukan hanya sebatas hubungan sesama lembaga atau institusi tapi lebih kepada hubungan yang erat karena sama-sama memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa. Faktanya, hubungan antara Gereja dan Negara hanya menjadi konsumsi politik dan persoalan pandangan yang menjurus kepada perbedaan pendapat bukan sesuatu yang mudah untuk dirumuskan menurut Yewangoe (2015). Belajar dari peristiwa sejarah masa lalu relasi antara Gereja dan Negara menunjukkan bahwa yang terjadi adalah kompetisi untuk saling menguasai. Kita menemukan banyak kasus antara Gereja dan Negara di mana negara ingin menguasai Gereja sehingga ajaran dan kebijakan yang berlaku di dalam gereja ditentukan atau mengikuti keinginan negara.

Jika kita belajar dari pengalaman gereja pada abad ke-4M sejarah mencatat hubungan Gereja-Negara berjalan tidak seimbang dan tidak sehat yang dimulai saat Konstantin Agung memerintah dan menjadi seorang Kristen karena Negara berperan menentukan mana yang dipandang baik dan mana yang tidak baik. Kasus yang sama terjadi di Indonesia, pemerintah

kolonial Belanda menempatkan “*Commissarissen*” sebagai pengurus-pengurus Jemaat ‘De Indische Kerk’ yang pada saat itu menjadi gereja-gereja sebagai representasi pihak negara yang berkepentingan.

Menurut pandangan Loser (2007), relasi Gereja dan Negara memiliki tiga model yaitu pemisahan ketat, asimilasi dan interaksi. Pertama adalah pemisahan ketat yang membuat gereja pasif terhadap Negara, karena kelompok Kristen memilih untuk tidak aktif di dalam bidang sosial dan politik. Pemisahan dengan model asimilasi juga membuat gereja tidak berdaya karena kelompok yang beragama telah diisi dan dikuasai sehingga gereja secara pasif hanya mampu menerima tanpa menolak kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini gereja terkesan lebih bersikap pasif. Sedangkan dalam bersikap Interaksi gereja justru mampu bertahan lebih lama di kontemporer karena gereja bersikap lebih aktif melakukan peran pembaharuan dan pembebasan yang berperan lebih aktif, kritis positif dan berani mengambil resiko besar dalam menjalankan peranannya bagi negara dan rakyat.

Ngelow (1994) memiliki pandangan yang berbeda, Ngelow membaginya menjadi 5 model hubungan Gereja dan Negara. Pertama, Ecclesiocracy yaitu kesatuan Gereja dan Negara yang memberi kuasa kepada Negara. Kedua, Erastianisme yaitu Gereja memberi Negara kuasa atas gereja. Ketiga, Establishment Principle yaitu kesatuan aliran gereja tertentu dengan Negara. Keempat, National Confessionalism yaitu Negara memberikan pengakuan sah atas pemerintahan Yesus Kristus dan Firman. Kelima, *Secularism* yaitu pemisahan dalam segala hal antara Gereja dan Negara.

Alkitab Perjanjian Baru menggambarkan dengan jelas bagaimana relasi gereja dengan negara yang menunjukkan politik sebagai suatu wilayah sendiri yang tidak berhubungan dengan kehidupan Gereja yang cenderung berfokus kepada acara dan liturgi keagamaan, menolak perbuatan dan tindakan kedagingan dan hal-hal duniawi atau sekuler. Hal ini jelas dengan lahirnya komunitas esensi yang memilih terpisah dari masyarakat umum dan berdomisili di gua Qumran pada abad satu masehi.

Menurut Calvin dan Yewangoe (1994), relasi Gereja dan Negara dua institusi yang titik pusat dan pertemuannya pada Yesus Kristus. Gereja dan Negara memiliki titik pusat pertemuan dan persatuan yaitu Yesus Kristus. Artinya, baik Gereja maupun Negara sama-sama memiliki panggilan pelayanan yang bersumber dari satu pribadi Sang Pemilik Kehidupan dan Pencipta alam semesta yaitu Yesus Kristus. Perbedaan pelayanan kedua Lembaga tersebut ada pada ruang lingkup masing-masing namun memiliki tanggung jawab yang sama yaitu mensejahterakan umat. Negara memiliki peran dan tanggung jawab menciptakan Undang- Undang untuk melindungi warganya yang di dalamnya termasuk Gereja dalam hal ini memberikan kebebasan bagi warga gereja untuk menjalankan ibadahnya tanpa diintervensi Negara.

Sikap yang nampak dalam kehidupan gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru terhadap hubungannya dengan pemerintah/negara adalah penerimaan dan ketaatan. Sikap ini berdasarkan keyakinan gereja bahwa negara dan pemerintah hadir di dalam dunia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kesejahteraan Ilahi sebagai wakil Allah (Rm 13:1-7; I Ptr 2:13-14). Paulus dan Petrus sebagai Rasul Kristus pada saat itu mengambil sikap tersebut dengan alasan, pertama, karena pada masa itu gereja adalah kelompok minoritas dan mayoritas anggota gereja berasal dari golongan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Kedua, karena gereja pada saat itu menganggap bahwa Kristus akan datang kedua kali dalam waktu singkat. Gereja berharap masa waktu itu segera berakhir dan Kerajaan Allah akan segera datang. Gereja mula-mula menunjukkan bahwa mereka sangat mengharapkan segera berjumpa dengan Kristus Sang Penyelamat kehidupan.

Pertanyaan adalah apakah sikap gereja mula-mula yang bersikap menerima dan taat kepada negara dapat dilanjutkan pada saat ini? Gereja secara organisme dan organisasi harus menjadi contoh pribadi yang taat hukum dan aturan Undang-Undang yang berlaku di setiap negara. Menurut Pranoto (2007) dalam Jurnal Amanat Agung bahwa Sikap taat dan menerima setiap kebijakan pemerintah dan apapun yang terjadi tidak menjadikan gereja seolah-olah bersifat pasif dan tunduk tanpa pengertian dan tidak memberikan suara kenabiannya jika ada kebijakan dan sesuatu yang salah pada negara. Gereja harus berfungsi sebagai perwakilan Allah yang hadir menyampaikan suara kebenaran dan aktif memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa (Yer 29:7).

### **Mewujudkan Misi Gereja dalam Pengamalan Sila ke-4 Pancasila**

Secara etimologis makna filosofis dari Pancasila terungkap secara ideologis dalam lima sila. Pancasila merupakan istilah yang bersumber dari Bahasa Sansekerta. Pañca yang berarti lima, sila berarti asas, prinsip. Jadi Pancasila mengandung arti lima pedoman, prinsip, atau pandangan hidup rakyat Indonesia. Bila kita mengamati dengan cermat sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia, kita akan menemukan nilai-nilai luhur yang diambil dari tradisi hidup bangsa Indonesia. Presiden Pertama Indonesia Soekarno dalam pandangannya yang dibaca oleh Suwarno (Dewantara, 2017), menunjukkan dasar dan filosofi bangsa Indonesia yang sangat praktis dan merupakan gambaran dari teknis atau pola hidup manusia Indonesia: Rumusan formal dari Pancasila mempunyai akar yang dalam dan kuat pada sikap, tradisi dan budaya gotong-royong masyarakat Indonesia. Dasar dan Akar Budaya yang di kemudian hari dikenal sebagai Pancasila material oleh Notonegoro.

Jika berbicara Pancasila formal maka tidak lain merujuk kepada cetusan rasional (tahapan proses penggalan selama bertahun-tahun) dari Pancasila material yang mewarnai kehidupan bermasyarakat dan berkembang dalam sejarah bangsa, agama, peradaban, lembaga sosial, hidup ketatanegaraan dan lain sebagainya yang berciri khas semangat gotong. Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa yang telah terbukti tahan uji terhadap berbagai tantangan, ancaman dan serangan yang mengganggu kesatuan bangsa Indonesia sebagai suatu negara. Bung Karno berkata, “saudara-saudara, sulit sekali persatuan rakyat Indonesia itu kalau tidak didasarkan pada Pancasila” (Sukarno, 2017). Menurut Driyarkara dalam Sudiarja (2006), “Manusia merupakan suatu kesempurnaan, tetapi bisa berarti juga kemungkinan kesempurnaan. Bahkan, inilah sejukurnya kesempurnaannya bahwa ia adalah kemungkinan ke kesempurnaan.” Dari pemikiran tersebut, Pancasila menjadi dasar untuk menggali pemahaman, pengertian dan kebenaran yang terkait dengan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan secara sempurna. Pancasila sebagai weltanschauung (pandangan hidup) telah tertanam mengakar dalam kehidupan rakyat Indonesia, walaupun harus perlu digali.

### **Misi Gereja mewujudkan Sila ke-4 di semua Komunitas Gereja**

Sebagaimana Gereja hadir dengan identitas karakter Kristus yang mengasihi sesama, mengampuni, membawa damai, menghargai sesama dan saling membantu seperti gereja mula-mula, maka perwujudan Sila ke-4 Pancasila menjadi hal yang mudah dilakukan. Masalahnya bukan mudah atau tidak mudah dilakukan tetapi pada komitmen, keseriusan dan konsistensi mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila khususnya sila ke-4 dalam setiap komunitas dimulai dari keluarga Kristen yang menjadi tempat pertama dan utama menanamkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa.

Bagaimana mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-4 di dalam setiap komunitas Kristen? Berikut ini penjelasannya.

#### **1. Misi Gereja Mewujudkan Sila ke-4 Pancasila di dalam Komunitas Keluarga**

- Orang Tua menjadi orang pertama untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yang termuat di dalam Pancasila sila ke-4.

- Membangun kebiasaan komunikasi terbuka dan aktif tanpa memaksakan kehendak.
  - Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya.
  - Memberikan contoh menerima dan menghargai setiap perbedaan pendapat.
  - Mengajarkan betapa pentingnya kejujuran dan berkomunikasi dan berdemokrasi.
  - Membiasakan diri tidak memaksakan kehendak dalam berbicara dan berdiskusi.
  - Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada anak-anak untuk melatih sikap dan mentalitas pekerja tim bukan pekerja tunggal.
  - Membiasakan berdiskusi sebelum mengambil keputusan.
2. Misi Gereja Mewujudkan Sila ke-4 Pancasila di dalam Komunitas Gereja.
- Membiasakan membangun komunikasi terbuka kepada pelayan dan jemaat untuk setiap keputusan dan kebijakan.
  - Menyampaikan pengajaran yang membangun kebersamaan, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kejujuran, cinta damai dan tidak memaksakan kehendak.
  - Membangun budaya menghargai semua suku bangsa.
  - Membiasakan menghargai perbedaan pendapat dalam setiap pembicaraan.
  - Membuat program kebersamaan sehingga terbangun nilai-nilai persatuan dan kesatuan.
3. Misi Gereja Mewujudkan Sila ke-4 Pancasila di dalam Komunitas Sekolah Kristen.
- Mengutamakan cinta damai dalam setiap hubungan.
  - Menanamkan nilai-nilai saling menghargai dan menghormati.
  - Tidak memandang suku dan agama.
  - Mengadakan acara saling berbagi kasih setiap minggu untuk membangun cinta kasih antar sesama.
  - Menanamkan nilai-nilai kejujuran dan berdemokrasi.
  - Membangun kebiasaan berdiskusi sejak dini dan menghargai perbedaan pendapat.
  - Belajar memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara.
  - Tidak memotong pembicaraan orang ketika sedang berbicara.
  - Menyampaikan pendapat dengan sopan santun tanpa memaksakan kehendaknya.
4. Misi Gereja Mewujudkan Sila ke-4 Pancasila di dalam Masyarakat.
- Aktif di dalam setiap acara pertemuan di kelurahan atau desa.
  - Terlibat dalam kerja bakti di kelurahan atau desa.
  - Memberikan sumbangan pemikiran dan bantuan mengerjakan pekerjaan di lingkungan setempat.
  - Menghargai semua suku dan agama (tidak membeda-bedakan).
  - Membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang agama dan suku.
  - Menyampaikan pendapat dengan sopan santun dalam setiap pertemuan.
  - Memilih bukan karena hubungan agama dan suku tetapi karena hati Nurani yang murni untuk kemajuan kota dan bangsa.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Gereja perlu menyadari bahwa negara dapat menjadi alatnya Allah (Rm. 13:1-6) atau sebaliknya sebagai alatnya setan (Why. 13:1-10). Gereja yang mewakili Allah dan bertanggungjawab menyatakan suara kenabian merupakan bukti kehadiran gereja secara aktif disertai dengan tindakan nyata mendukung pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dimanapun gereja ditempatkan Tuhan. Peran serta dan tanggung jawab gereja terhadap negara menjadi suatu kewajiban, terutama dalam peran profetis gereja di dalam konteks Indonesia. Di samping itu, gereja juga mutlak mendukung semua program-program pemerintah yang dapat menciptakan kesejahteraan rakyat.

### **Rekomendasi**

Dalam konteks peran gereja dalam mewujudkan Sila ke-4 Pancasila, Gereja harus terus menerus mengembangkan dan memperluas peran di setiap lini kehidupan

yakni mengamalkan nilai-nilai sila ke-4 mulai di dalam Keluarga, Sekolah, Pekerjaan dan di Masyarakat.

### Daftar Pustaka

- <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/10/ketua-umum-gereja-pentakosta-capres-harus-berlantar-tni>
- <https://news.detik.com/berita/d-4527231/viral-relawan-bpn-sidak-gudang-kpu-bekasi-ini-penjelasan-bawaslu>
- <https://news.detik.com/berita/d-4527269/penjelasan-kpu-bekasi-dan-polisi-soal-relawan-sidak-gudang-kotak-suara>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/22/160000265/daftar-12-menteri-indonesia-yang-terjerat-kasus-korupsi?page=all>.
- Kartono, Kartini, (1998). *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Lugo, Gunche, (2009). *Manifesto Politik Yesus*, Yogyakarta: Andi.
- Menoh, Gusti A.B, (2014). *Relasi Gereja dan Negara, Tomoe Express Harian Kupang*.
- Ngelow, Zakaria J, *Pengalaman Kristen dalam Hubungan Agama dan Negara, Pointers pada seminar Gereja dan Isu-Isu Agama*.
- Niftrik, Van G.C dan Boland, B.J, (2001). *Dogmatika Masa Kini*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rodee, Carlton Clymer dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grafindo Persada 2000.
- Sairin, Weinata dan Pattiasina, J.M, (1996). *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sinaga, Martin L. (2001). *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputera*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Singgih, Emanuel Gerrit, (2000). *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Soedarmo, R, (2002). *Kamus Istilah Teologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Suseno, Franz Magnis, (2004). *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Obor.
- Suseno, Franz Magnis, (2014). *Iman dan Hati Nurani*, Jakarta: Obor.
- Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, (1996). *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Yewangoe, Andreas A, (2015). *Agama dan Negara: Sebuah Hubungan Yang Tidak Mudah, Disampaikan Dalam Kursus "Pendidikan Politik Angkatan III" di Palangkaraya*.